

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju melakukan pembangunan untuk kemajuan negaranya, termasuk negara Indonesia. Namun dampak dari pembangunan tersebut belum dirasakan oleh semua masyarakat. Banyak daerah di pelosok yang masih minim fasilitas-fasilitas yang berarti pembangunan belum sepenuhnya memasuki daerah tersebut. Adanya pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau daerah bersifat administratif, memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Hal tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Todaro bahwa “jika suatu negara menghendaki pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka ia harus memulainya dari daerah pada umumnya, dan sektor pertanian pada khususnya”¹. Jadi, pembangunan di daerah sangat penting untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Saat ini sebagian besar daerah di Indonesia sudah ada yang melakukan pembangunan, meskipun belum terjadi secara keseluruhan. Adanya pembangunan di setiap lokasi tersebut, masyarakat bisa menikmati kesetaraan

¹ Micheal P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh (Jakarta: Erlangga, 2000), p. 432

dalam aspek sosial dan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan di setiap daerah mau pun kota. Selanjutnya pembangunan yang ideal dari setiap lokasi di Indonesia tentu saja mengharuskan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (satu) dan tingkat II (dua) untuk menganggarkan sejumlah dana untuk menunjang dan/atau bahkan meningkatkan standar mutu dari fasilitas-fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, keuangan daerah adalah kewenangan dan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta dari Provinsi ke Kabupaten/Kotamadya yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan dalam menggali sumber keuangan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemampuan dan pengelolaan keuangan suatu daerah dapat menjadi tolak ukur dalam kemandirian daerah tersebut dalam melakukan otonomi daerah. Artinya, daerah yang otonomi harus mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya serta dalam pembiayaan pembangunan daerah masing-masing. Kemandirian suatu daerah sangat diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena suatu daerah yang mandiri berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat akan menjadi rendah atau bahkan bisa tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah yaitu untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat. Oleh karena itu, terkait fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam hal menggali berbagai potensi daerah yang ada. Maka dari itu pentingnya pembangunan di suatu daerah atau kota, termasuk dana yang berkaitan dengan hal tersebut, maka pihak pemerintah di setiap provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan di Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap sumber dana yang umumnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, yaitu Pendapatan Daerah.

Diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari²:

- a) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
- b) dana perimbangan,

² Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Andi, 2002), p. 18

- c) pinjaman daerah, dan
- d) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah yang paling berkontribusi dalam menyumbangkan Pendapatan Daerah. Dengan adanya dana dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), pihak pemerintah bisa memaksimalkan setiap program yang diperuntukkan untuk membangun dan memelihara fasilitas umum dan investasi bisnis yang disahkan oleh pihak pemerintah.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk perkembangan dari setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah yang mencukupi, maka bisa dipastikan hampir semua program pembangunan yang dicanangkan di kabupaten dan kota di setiap pelosok Indonesia bisa dilaksanakan sesuai dengan atau bahkan melebihi target pembangunan yang ada di dalam rancangan pengelolaan pembangunan di daerah tersebut.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. PAD juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan otonomi

daerah. Pendapatan Asli Daerah yang besar juga menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam menanggung biaya pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena pendapatan asli daerah itu sendiri berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang didapatkan dari masyarakat daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah yang besar dapat memberikan kebebasan besar bagi Pemerintah Daerah untuk membuat inisiatif dan rencana yang dibutuhkan oleh daerah.



Sumber: Media Keuangan Daerah, 2013

Gambar I.1
Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia
Tahun Anggaran 2013

Untuk Kabupaten dan Kota se Indonesia Komposisi Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota se Indonesia yaitu sebesar 76% atau Rp.369.908,26 Miliar, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 14% atau Rp.66.416,11 Miliar dan Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi terendah yaitu sebesar 10% atau Rp.47.815,63 Miliar. Dengan demikian ketergantungan Pemerintah

Kabupaten dan Kota pada dana perimbangan masih sangat dominan, karena peran Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dalam menyumbang pendapatan daerah kabupaten dan kota.

Tabel I.1
Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia

Tahun	PAD	Dana Perimb.	Lain-Lain Pend. Drh Yg Sah
2011	8,52%	77,98%	13,50%
2012	9,09%	78,78%	12,13%
2013	9,88%	76,41%	13,72%

Sumber: Media Keuangan Daerah, 2013

Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013 (Kabupaten dan Kota se Indonesia) terhadap total pendapatan daerah menggambarkan untuk TA 2011 porsi Dana Perimbangan memberikan kontribusi tertinggi sebesar 77,98% atau sejumlah Rp.279.726,76 Milyar, diikuti dengan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 13,50% atau sejumlah Rp.48.439,66 Miliar. Untuk TA 2012 porsi Dana Perimbangan memberikan kontribusi tertinggi sebesar 78,78% atau sejumlah Rp.326.383,93 Milyar, diikuti dengan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 12,13% atau sejumlah Rp.50.263,42 Miliar. Untuk TA 2013 porsi Dana Perimbangan masih memberikan kontribusi tertinggi sebesar 76,41% atau sejumlah Rp.369.908,26 Milyar, diikuti dengan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 13,72% atau sejumlah Rp.66.416,11 Miliar. Dari tabel diatas porsi Dana Perimbangan

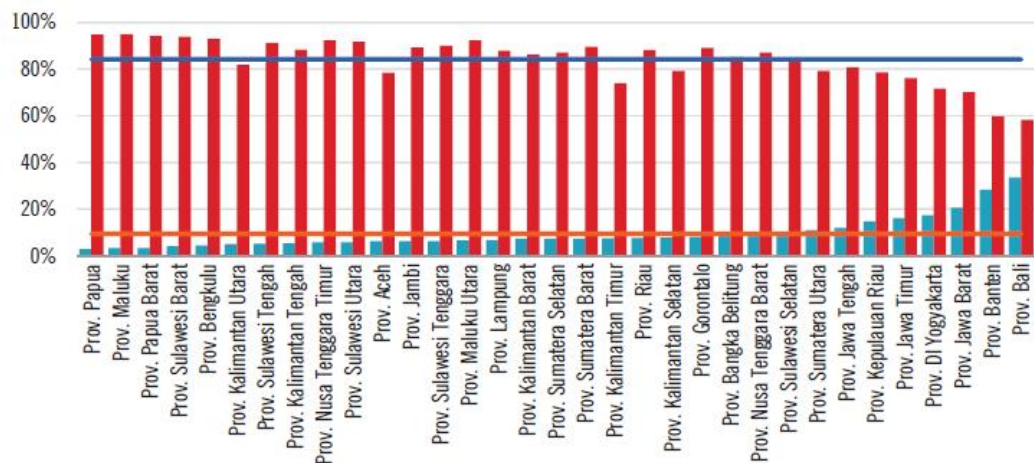
terhadap Total Pendapatan Daerah sangat dominan setiap tahunnya, hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota masih sangat tergantung dari Dana Perimbangan.

Menurut Mahmudi, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Daerah harus mengoptimalkan sumber daya daerahnya, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Secara umum, pajak daerah dan retribusi memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Walaupun sebagian besar penerimaan pendapatan asli daerah di peroleh dari pajak daerah dan retribusi daerah, namun sumber-sumber lain di luar pajak juga ikut mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah³.

Jika pendapatan asli daerah setiap provinsi, kabupaten, kota rendah maka keuangan daerah setiap provinsi, kabupaten, kota untuk membiayai belanja daerah akan diperkecil. Hal tersebut menghambat perkembangan dan kesejahteraan

³ Mahmudi, *Manajemen Keuangan daerah* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), p. 33

daerah. Basri (2009) mengemukakan dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Isran bahwa “kekurang-seimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu penyebab eksese melebarnya ketimpangan tingkat kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan kemampuan keuangan antar daerah”⁴.



Sumber: Media Keuangan Daerah, 2013

*) tidak termasuk DKI Jakarta

Gambar I.2 **Rasio Ketergantungan Pemerintah Kabupaten dan kota Se-Provinsi Tahun 2013**

Pada Gambar I.2 terlihat bahwa rata-rata rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah 8,5%, sedangkan rata-rata rasio dana transfer terhadap Pendapatan Daerah mencapai 91,2%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-provinsi terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Rasio PAD terhadap pendapatan tertinggi terdapat pada seluruh pemerintah

⁴ Muhammad Isran, *Perbedaan Pendapatan Antar Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia*, Juni 2014 (<http://beritadaerah.co.id/2014/06/13/perbedaan-pendapatan-antar-provinsi-di-kawasan-timur-indonesia-2/>), diakses tanggal 1 Oktober 2014 pukul 16.19 WIB

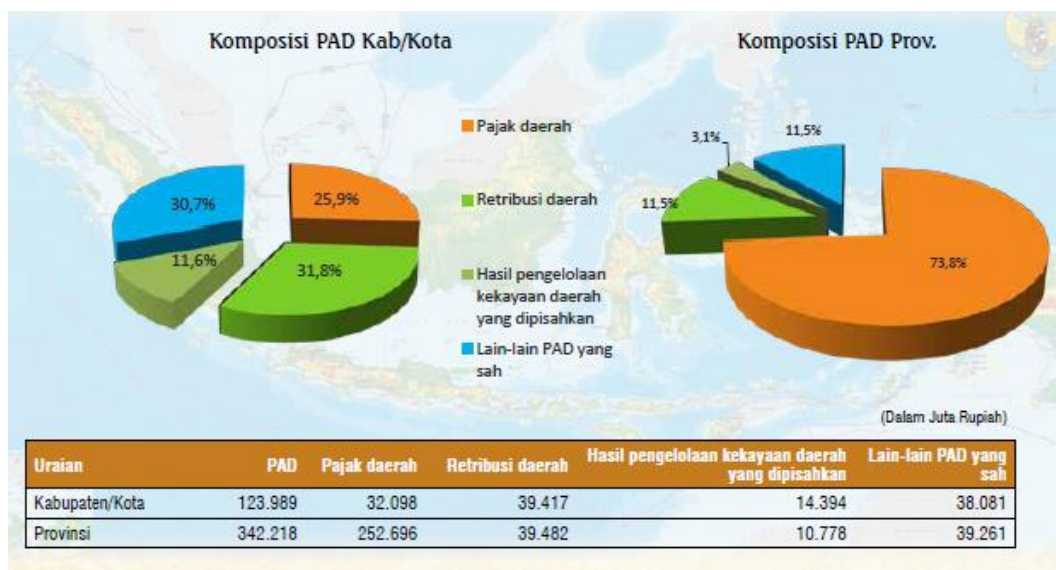
kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Bali yang mencapai 31,6%. Dari rasio PAD terhadap Pendapatan Kabupaten dan Kota yang diatas rata-rata nasional ada di 9 Provinsi, yaitu di Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, yang artinya memiliki tingkat ketergantungan yang rendah dari pemerintah pusat. Sedangkan yang terendah adalah di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Papua yaitu hanya sebesar 2,4%, diikuti oleh Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kalimantan Utara yang artinya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, rasio dana transfer terhadap pendapatan yang tertinggi terdapat di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua yang mencapai sebesar 97,4%, diposisi selanjutnya ada Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sulawesi Tengah yang artinya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah pusat. Sedangkan yang terendah adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Bali yang mencapai sebesar 68,4%. Rasio Dana Transfer terhadap Pendapatan Kabupaten dan Kota yang dibawah rata-rata nasional ada di 10 Provinsi, yaitu di Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau, yang artinya memiliki tingkat ketergantungan yang rendah dari pemerintah pusat.

Ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap dana transfer membuat pendapatan asli daerah belum menjadi sumber utama pendapatan daerah. Hal ini

seharusnya menjadi tugas utama pemerintah kabupaten/kota mengelola kemampuan keuangan daerah dalam menggali pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan di kabupaten/kota masing-masing.

Provinsi Bengkulu termasuk dalam provinsi yang masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilihat dari rasio pendapatan asli daerah yang berada dalam rasio pendapatan asli daerah terendah dan rasio dana transfer yang berada dalam rasio dana transfer tertinggi. Provinsi Bengkulu yang mempunyai 9 kabupaten dan 1 kota termasuk ke dalam provinsi yang memiliki rasio pendapatan asli daerah kabupaten/kota terendah. Hal ini mungkin dikarenakan ada kabupaten dari Provinsi Bengkulu yang mengalami pemekaran seperti tahun 2003 berdiri Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma yang keduanya merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Kabupaten Muko-Muko yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 terbentuk pula Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang keduanya merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Dan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pemekaran pada tahun 2008. Dengan adanya pemekaran inilah rasio pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu belum optimal.



Gambar I.3
Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Bengkulu
Agregat Prov., Kab., dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi PAD Provinsi Bengkulu di dominasi oleh pajak daerah sebesar 73,8%, selanjutnya retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sebesar 11,5%, dan terakhir hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,1%. Sedangkan untuk komposisi PAD Kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu tahun 2008 – 2011 bahwa retribusi daerah menyumbang PAD sebesar 31,8%, lain-lain PAD yang sah sebesar 30,7%, selanjutnya pajak daerah sebesar 25,9% dan terakhir hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 11,6%.

Tinggi rendahnya pendapatan asli daerah merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi dan pembiayaan belanja daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, jumlah wisatawan, jumlah kendaraan bermotor, dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam hal ini perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang bila ada pertumbuhan *output*. Guna meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk kegiatan daerahnya sendiri, baik penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada publik, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Menurut Musgrave, “besar kecilnya pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jadi PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah”⁵. Abdul Halim mengemukakan bahwa “salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah pertumbuhan PDRB”⁶. Menurut Clark dan Lawson “pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik pula”⁷. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan perkapita riil yang berlangsung secara terus menerus yang bersumber dari dalam daerah. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan berarti akan secara langsung dapat mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga penerimaan pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan.

Pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Agus widarjono dalam jurnal Ari Budiharjo mengemukakan bahwa, “jumlah penduduk

⁵R.A.Musgraves dan P.B. Musgraves, *Keuangan Negara Dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 1998), p. 176

⁶ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2001), p. 101

⁷ Clark J.R. dan Robert A. Lawson, ‘The Impact of Economic Growth: Tax Policy and Economic Freedom On Income Inequality’, *The Journal of Private Enterprise*, 2008, p. 23

yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan”⁸. Penduduk sebagai asset pembangunan apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Penduduk sebagai subjek pajak yaitu orang pribadi yang dapat dikenakan pajak daerah. Serta penduduk juga sebagai wajib pajak yaitu orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong tertentu. Sehingga semakin banyak subjek pajak dan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak daerah, akan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang mana pajak daerah tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli daerah.

Jumlah wisatawan juga salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. setiap daerah memiliki keuntungan dalam pariwisata baik dalam wisata alam, budaya, kuliner dan sebagainya. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi wilayahnya dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana dengan mengembangkan industri pariwisata yang akan menarik banyak wisatawan datang ke daerah-daerah yang memiliki tempat wisata yang menarik.

Mendatangkan banyak wisatawan akan bermanfaat dalam menambah pajak daerah antara lain, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi obyek wisata yang mana peningkatan penerimaan pajak daerah juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, wisatawan tidak

⁸ Ari Budiharjo, ‘SPs-Undip’, *Pengaruh Jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah*, 2003, p. 159

tertarik untuk datang ke daerah atau provinsi yang mempunyai obyek wisata yang mengakibatkan jumlah wisatawan menurun maka akan membuat pendapatan asli daerah ikut menurun. Hal yang menyebabkan menurunnya jumlah wisatawan adalah adanya bencana alam seperti meletusnya Gunung Merapi tahun 2010 yang mengakibatkan wisatawan takut untuk datang berkunjung. Sehingga jumlah wisatawan di Provinsi D.I. Yogyakarta menurun pada tahun 2011. Serta adanya ancaman teroris juga membuat wisatawan merasa tidak aman untuk berkunjung ke Indonesia.

Berikutnya yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah jumlah kendaraan bermotor. Semakin canggih teknologi, sejalan pula dengan perkembangan transportasi, terutama kendaraan bermotor yang dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha. Karena setiap kendaraan bermotor yang dimiliki orang pribadi atau badan usaha akan dikenakan pajak dan retribusi diantaranya adalah pajak parkir, retribusi parkir, dan retribusi uji kendaraan bermotor. Jika pajak dan retribusi tersebut mengalami peningkatan, penerimaan pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

Investasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Investasi ataupun akumulasi modal sering kali terkonsentrasi pada daerah yang lebih maju yang memiliki ketersediaan infrastruktur yang jauh lebih baik. Peranan investasi pada pertumbuhan perekonomian sangat besar. Investasi memiliki pengaruh besar terhadap ketimpangan pembangunan dan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Konsentrasi investasi asing yang hanya terdapat pada

daerah tertentu akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah dalam suatu Negara (Nunnenkamp dan Stracke, 2008)⁹.

Menurut Todaro, ada 3 faktor atau komponen utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia,
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, dan
3. Kemajuan teknologi¹⁰.

Jika faktor tersebut memberi peranan sentral dalam mempengaruhi naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Apabila faktor-faktor itu berkembang dengan baik, maka penerimaan daerah akan turut berpengaruh, dan efeknya akan terciptanya pembangunan ekonomi yang pesat dan kesejahteraan masyarakat yang merata.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa di Provinsi Bengkulu jumlah pendapatan asli daerah kabupaten dan kota yang didapatkan masih belum optimal sampai tahun 2014. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh antara PDRB dan pendapatan asli daerah.

⁹ Muhammad Isran, *loc.cit.*

¹⁰ Micheal P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan (Jakarta: Erlangga, 2003), p. 92

2. Ada pengaruh antara jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah
3. Ada pengaruh antara wisatawan dan pendapatan asli daerah
4. Ada pengaruh antara kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah
5. Ada pengaruh antara investasi dan pendapatan asli daerah

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang luas. Maka penelitian ini dibatasi pada masalah:

1. Pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
2. Pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
3. Pengaruh jumlah wisatawan dan jumlah kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu?
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah wisatawan dan jumlah kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu tentang jumlah wisatawan dan jumlah kendaraan bermotor serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi tentang jumlah wisatawan dan jumlah kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah.